

PEMAHAMAN ATURAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAFTAR NPWP SECARA KOLEKTIF

(Studi Kasus Pada Unika Soegijapranata Semarang)

St. Dyah Ayu Ratnaningsih, SE.,Msi¹

Rini Hastuti, SE.,Msi²

Sih Mirmaning Damar Endah,SE.,MSi³

ABSTRACT

As sunset policy's run to increase government tax revenue, people went in queue to get the tax identity number (Nomor Pokok Wajib Pajak or NPWP) personally or collectively, regardless they really knew what the consequences or they only followed the trend. This research seek to know how the understanding of tax rules for collective tax payer and does the understanding of tax rules level significantly influence toward the accomplishment of tax obligation? Hence, the hypothesis is there is an influence between understanding of tax rules level toward the accomplishment of tax obligation. The sample of this research is 105 respondents, and are selected with these following criteria: administrative and educative staff, collectively got their tax identity number, and had the time to fulfill the questionnaire. Validity and reliability test show that the instruments are all valid and reliable. It is found that the mean of the understanding of tax rules for collective tax payer is 88.08. It means that the understanding level is in medium range.

The average of the accomplishment of tax obligation is 7.35 means that there is a high level of accomplishment. The result of the regression test shows that there's no influence between the understanding of tax rules level to the accomplishment of tax obligation. The result proves that the hypothesis is aside. There are three research limitations are found, first that there's a few respondents testable response, second all of the respondents use form 1770SS only, and third the use of self rating method by the variable of accomplishment of tax obligation.

Keywords: collective, tax rule understanding level, accomplishment of tax obligation

I. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu alternative yang menjadi primadona bagi pendapatan pemerintah. Undang – undang perpajakan menuntut semua warga negara yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai subyek pajak, oleh karena itu mereka wajib untuk mendaftar NPWP.

¹ Staf Pengajar Jurusan Akuntansi FE Unika Soegijapranata Semarang

² Staf Pengajar Jurusan Akuntansi FE Unika Soegijapranata Semarang

³ Staf Pengajar Jurusan Akuntansi FE Unika Soegijapranata Semarang

Sistem pembayaran pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assesment* dimana pemerintah menuntut warga Negara untuk aktif melaporkan pajaknya. Sistem *Self assesment* yang diterapkan saat ini memungkinkan seorang wajib pajak dengan tingkat kesadaran pajak yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak, dengan tidak mau memiliki NPWP sehingga tidak melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, dalam upaya ekstensifikasi perpajakan, saat ini pemerintah menerapkan kebijakan *sunset policy* sebagai upaya meningkatkan jumlah masyarakat ber – NPWP. Kebijakan *sunset policy* ini juga dikuatkan dengan perubahan peraturan pajak penghasilan dengan memberikan *reward*, berupa kemudahan dan keringanan tarif pajak bagi mereka yang memiliki NPWP dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki NPWP, diharapkan akan mampu menambah penerimaan pajak pemerintah, dengan asumsi dengan semakin banyak orang yang ber-NPWP maka akan semakin banyak orang yang kemudian melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Kebijakan pemerintah tersebut kemudian disikapi positif oleh beberapa institusi yang kemudian secara sukarela melakukan pendaftaran kolektif NPWP bagi karyawan – karyawan yang bernaung di dalamnya. Salah satunya adalah UNIKA Soegijapranata karena sebagai sebuah institusi pendidikan, UNIKA Soegijapranata diharapkan mampu memberikan kontribusi ke masyarakat, salah satunya dengan memberikan contoh nyata, bagaimana berperilaku taat hukum. Akan tetapi pendaftaran secara kolektif ini memiliki kelemahan, yaitu ada kemungkinan, mereka yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, tetap tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian sebelumnya oleh Stefana Dyah Ayu dan Rini Dwi Hastuti (2007), menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajak adalah pandangannya terhadap kompleksitas dari aturan pajak yang ada. Semakin kompleks aturan menyebabkan pemahaman terhadap aturan menjadi rendah, sehingga dampaknya adalah wajib pajak menjadi tidak patuh pajak. Kondisi ini semakin diperparah, ketika pendaftaran NPWP yang dilakukan bukan atas kesadaran, melainkan karena paksaan dari institusi. Kemungkinan besar tingkat pemahaman terhadap aturan perpajakan adalah rendah, sehingga kemudian mereka tidak tahu bahwa dengan ber- NPWP membawa konsekuensi – konsekuensi untuk melaporkan kewajiban pajak mereka. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang dilakukan adalah dengan meneliti tingkat pemahaman aturan pajak pada WP yang mendaftar secara kolektif dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kewajiban pajak mereka.

Semua warga negara yang memiliki penghasilan di atas PTKP wajib untuk mendaftar NPWP. Akan tetapi, sistem *Self assesment* yang diterapkan saat ini memungkinkan seorang wajib pajak dengan tingkat kesadaran pajak yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan dengan tidak mau memiliki NPWP sehingga tidak melaporkan pajaknya. Kebijakan *sunset policy* yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan jumlah masyarakat ber – NPWP. Kebijakan ini nantinya diharapkan akan mampu menambah penerimaan pajak pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis apakah ekstensifikasi perpajakan saat ini yang diterapkan dengan adanya kebijakan *sunset policy* mampu merubah kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, karena meskipun sudah ber- NPWP, dengan sistem *self assesment* yang diterapkan, masih dimungkinkan adanya *tax evasion* atau penghindaran pajak secara illegal. *Tax evasion* bisa terjadi bukan

dikarenakan unsur kesengajaan, tetapi karena rendahnya pemahaman terhadap aturan pajak, sehingga wajib pajak tidak menyadari adanya pelanggaran yang dilakukan, dalam hal ini tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. Hal ini terutama terjadi pada wajib pajak yang mendaftar secara kolektif. Peneliti merumuskan bagaimana tingkat pemahaman aturan pajak pada WP yang mendaftar secara kolektif dan apakah tingkat pemahaman berpengaruh pada pemenuhan kewajiban perpajakan WP yang mendaftar secara kolektif.

Diharapkan penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai efektifitas sunset policy pada wajib pajak ber – NPWP yang terdaftar secara kolektif terhadap penurunan tingkat penghindaran pajak, yang ditunjukkan melalui tingkat pemenuhan pajak dan bukti empiris mengenai tingkat pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan yang ada.

II. Kerangka Teoritis

II.1 .Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (1990), seperti dikutip Waluyo dan Ilyas (2000) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sebagaimana ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak seperti tersebut di atas, terlihat dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*): pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi mengatur (*regular*): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.

Mengacu pada pengertian dan fungsi pajak seperti tersebut di atas, maka kepatuhan (*compliance*) masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara menjadi sangat penting. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) menurut Roth et al., 1989:21 dalam Sour, 2004 menyatakan bahwa:

compliance with reporting requirements means that the tax payer files all required tax return at the proper time and that the returns accurately report tax liability in accordance with the internal revenue code, regulation, and court decision applicable at the time the return is filed.

II.2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

II.A. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

1. Struktur Ekonomi

Contoh: Pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Padahal pajak ini diperuntukkan untuk masyarakat di negara industri. Dalam pajak ini, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netto nya.

2. Perkembangan Intelektual dan Moral Penduduk

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiscus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol.

3. Cara Hidup Masyarakat di Suatu Negara

Contoh: masyarakat yang hidup di daerah tropis yang hanya memiliki dua musim sehingga memungkinkan mereka bekerja sepanjang tahun. Hal ini bisa mengakibatkan mereka bekerja lebih santai dan hasilnya tidak optimal.

4. Teknik Pemungutan Pajak Itu Sendiri

Contoh: untuk pajak yang cara perhitungannya rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit pula, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak. Jadi, setiap tahun, petugas pajak melakukan penyuluhan dari kantor perpajakan mulai dari pusat sampai ke daerah.

Perlawanan pasif sangat kuat dirasakan oleh pajak langsung dari pada pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh karena cara perhitungan pajak tidak langsung lebih sederhana dari pajak langsung.

II.B. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*), Melalaikan Pajak, dan Pelimpahan pajak.

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- 1.1. Menahan Diri
- 1.2. Pindah Lokasi
- 1.3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis
- 1.4. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*).

Pengelakan pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari *multinational corporation* yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll). Kecenderungan wajib pajak melakukan penghindaran atau pengelakan pajak (dengan asumsi negara yang mempunyai sistem penegakan hukum

yang bagus dan orang-orang yang tidak mudah disuap) adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak Besar Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), karena:
 - a. Perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau tim *lawyer* yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak;
 - b. Pembukuan dilakukan oleh banyak orang sehingga resiko terjadinya kebocoran juga besar;
 - c. Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan pajak, mereka harus memperkecil keuntungannya di mata publik. Perusahaan yang labanya kecil, performancenya akan turun sehingga harga sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun di depan relasi dagangnya. Sehingga mereka akan kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif pajak.
- Wajib Pajak Kecil Wajib pajak kecil cenderung melakukan pengelakan pajak (*Tax Evasion*) karena:
 - a. tidak punya kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak;
 - b. apabila dokter/profesional bebas menyembunyikan sebagian pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh fiscus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya;
 - c. Penghasilan para profesional bebas sulit dilacak oleh *fiscus* karena biaya yang dibayar oleh pasien kepada dokter tidak mengurangi penghasilan kena pajak seseorang. Biaya tersebut dianggap sebagai konsumsi.

1.5. Melalaikan Pajak.

1.6. Pelimpahan Pajak.

III. Keadilan Sistem Perpajakan

Equity theory (Adams 1963, 1965 dalam Wartick 1994) mendiskusikan *equity* dalam istilah input dan *outcome*. Ketika seseorang mempunyai rasio *outcome* terhadap input yang berbeda dengan yang seharusnya maka terjadilah *inequity* (*distributive justice*). Kritik terhadap teori ini menyatakan bahwa teori tersebut hanya mempertimbangkan keadilan (*fairness*) atas *outcome* saja daripada keadilan prosedur yang justru menghasilkan *outcome*. Oleh karena itu keadilan atas mekanisme, struktur, dan proses sering disebut dengan istilah *procedural justice*. Teori Kognisi Referen (*referent cognitions theory*) adalah teori yang memprediksi bahwa seseorang akan mengalami perasaan deprivasi relatif (*relative deprivation*) dan memberikan respon terhadap perasaan tersebut. Salah satu prediksi respon yang ditunjukkan adalah atas ketidakadilan yang diamatinya. Teori ini mengintegrasikan *distributive justice* dan *procedural justice* menjadi evaluasi keadilan (*fairness*).

Salah satu asas pemungutan pajak yang paling penting sebagaimana dikemukakan oleh Smith dalam Waluyo dan Ilyas (2000), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas *equality*. Asas *equality* ini menegaskan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata, yaitu dikenakan kepada

orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

Asas keadilan tersebut didukung oleh Musgrave dalam Waluyo dan Ilyas (2000) yang menyatakan bahwa terdapat dua macam asas keadilan dalam pemungutan pajak:

- (1) *Benefit principle*: setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.
- (2) *Ability principle*: setiap pajak yang dibebankan kepada wajib pajak didasarkan atas kemampuannya untuk membayar.

Keadilan pungutan pajak, juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

- (1) Keadilan horisontal: apabila beban pajaknya sama atas setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
- (2) Keadilan vertikal: apabila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama.

Dengan menggunakan konsep keadilan ini maka akan dapat dilihat bagaimana kemungkinan kecendrungan seseorang untuk menghindari pajak.

Pengembangan Hipotesis : Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendaftar Secara Kolektif Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Mereka

Saat ini pemerintah menerapkan kebijakan *sunset policy* sebagai upaya meningkatkan jumlah masyarakat ber – NPWP. Kebijakan *sunset policy* ini juga dikuatkan dengan perubahan peraturan pajak penghasilan dengan memberikan reward, berupa kemudahan dan keringanan tarif pajak bagi mereka yang memiliki NPWP dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki NPWP. Bagi pemerintah kebijakan ini nantinya diharapkan akan mampu menambah penerimaan pajak pemerintah, dengan asumsi dengan semakin banyak orang yang ber-NPWP maka akan semakin banyak orang yang kemudian melaporkan dan membayarkan pajaknya. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis apakah ekstensifikasi perpajakan dengan penerapan kebijakan *sunset policy* mampu merubah kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, karena meskipun sudah ber- NPWP, dengan sistem *self assesment* yang diterapkan, masih dimungkinkan adanya penghindaran pajak. Terlebih berdasarkan fenomena yang ada hampir semua instansi kemudian menguruskan NPWP untuk tiap pegawainya secara kolektif. Disini terlihat, bahwa pengurusan NPWP lebih pada kondisi keterpaksaan, bukan karena adanya pemahaman mengenai keharusan untuk membayar pajak. *Tax evasion* bisa terjadi bukan dikarenakan unsur kesengajaan, tetapi karena rendahnya pemahaman terhadap aturan pajak, sehingga wajib pajak tidak menyadari adanya pelanggaran yang dilakukan, dalam hal ini tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. Sedangkan orang yang mengetahui secara pasti aturan pajak, akan cenderung untuk menaati pajak, karena tahu persis apa kewajibannya dan konsekuensi negatif, jika ia melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini dihipotesiskan bahwa :

Ha : Terdapat pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak WP yang mendaftar secara kolektif.

III. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999 : 115). Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di UNIKA Soegijapranata Semarang. Total karyawan dan dosen di UNIKA sebanyak 397 dikurangi karyawan kontrak 38 orang, dosen tetap terbatas 9 orang, sehingga populasi penelitian sebanyak 350 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 1998: 117). Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria :

1. Wajib Pajak adalah Staff Administrasi dan Edukatif UNIKA Soegijapranata tetap
2. Wajib Pajak didaftarkan NPWP secara kolektif oleh institusi
3. Wajib Pajak dapat ditemui dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Variabel Independen : Pemahaman Aturan Pajak

Pemahaman aturan pajak disini adalah tingkat pengetahuan responden mengenai kewajiban pelaporan pajak yang harus dilakukannya. Tingkat pemahaman diukur berdasarkan aturan pajak, dengan menggunakan skala likert 5. Jawaban SSS (Sangat setuju) diberi skor 5 artinya responden memiliki pemahaman tinggi terhadap aturan perpajakan, demikian sebaliknya Jawaban STS (Sangat Tidak setuju) dan TM (tidak mengetahui adanya aturan tersebut) diberi skor 1 artinya responden memiliki pemahaman rendah terhadap aturan perpajakan.

3.1.2. Variabel dependen : Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Kecenderungan melakukan penghindaran pajak didefinisikan sebagai seberapa baik seseorang memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel ini penelitian berupa pertanyaan mengenai pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan, dalam hal ini disesuaikan dengan jenis SPT yang dilaporkan. , dengan menggunakan skala likert 5. Jawaban SSS (Sangat setuju) diberi skor 5 artinya responden memiliki tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan tinggi terhadap aturan perpajakan, demikian sebaliknya Jawaban STS (Sangat Tidak setuju) diberi diberi skor 1 artinya responden memiliki tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan rendah

IV. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

IV.1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian Validitas dilakukan dengan membandingkan antara t- table dengan t- hitung. Pertanyaan dianggap valid jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Dengan sample sebesar 56 maka df adalah 54, berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh nilai r-tabel sebesar 0.2632. Berdasarkan hasil pengujian tersebut semua pertanyaan dalam variabel

penelitian yang pertama (pemahaman aturan pajak) adalah lebih besar dibandingkan 0.2632 sehingga semua pertanyaan adalah valid.

IV.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban pertanyaan seseorang dari waktu ke waktu stabil sama.. Pengujian dilakukan dengan cara reliability analisis. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach Alpha > 67.1%.

Tabel 3.4
Pengujian Reliabilitas

Varibel	Nilai Cronbach Alpha	Reliabilitas
Pemahaman	.9637	Reliabel
Kewajiban Pajak	.8173	Reliabel

Berdasarkan pengujian reliabilitas yang dilakukan diperoleh hasil nilai cronbach alpha sebesar 0.9637 dan 0.8173 yang berarti diatas 67.1%. sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pemahaman dan kewajiban pajak terwakili oleh instrument yang variabel.

IV.3. Uji Model

Uji Asumsi Klasik pada Model:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005 : 110). Penelitian ini menggunakan analisis Kolmogorov – smirnov untuk menguji data normal atau tidak. Melalui analisis yang dilakukan jika nilai kolmogorof smirnovnya tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini ditujukan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara variabel bebasnya (Ghozali, 2005: 91). Multikolienaritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak mengalami multikolienaritas jika tidak terdapat nilai tolerance yang lebih kecil dari 10 %, dan tidak terdapat nilai VIF yang lebih besar dari 10. Pengujian ini tidak dilakukan karena dalam penelitian hanya memiliki satu variable independen

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2005: 95). Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan metode Durbin – Watson. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi ketika nilai durbin Watson berkisar antara $1.585 < dw < (4 - 1.585)$. Dengan demikian model dikatakan memenuhi asumsi ini. Pengujian ini tidak perlu

dilakukan karena data yang digunakan berupa data primer persepsi seseorang pada suatu waktu tertentu bukan berupa data periode atau runtut waktu (time series) sehingga tidak ada periode yang sebelumnya ($t - 1$).

4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tingkat signifikansinya $> 5\%$.

IV.4.Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan persamaan sebagai berikut :

$$KWJB\ PJK = \beta_0 + \beta_1 PAHAM$$

Hipotesis diterima jika masing-masing koefisien regresi variable independent positif dan memiliki probabilitas value kurang dari α .

V. Gambaran Responden

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999 : 115). Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja di UNIKA Soegijapranata Semarang. Populasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa orang pribadi lebih bisa mewakili persepsi wajib pajak terhadap pajak yang ada. Persepsi Orang Pribadi disini bukan merupakan persepsi yang mewakili badan / organisasi tertentu, sehingga diharapkan akan mampu mencerminkan pandangan sesungguhnya seorang pembayar pajak atau wajib pajak terhadap penyelenggaraan pajak. Dari 350 responden yang menjadi target penelitian ternyata hanya 105 responden yang bersedia mengisi kuesioner. Dari 105 responden tersebut, dikeluarkan dari sampel penelitian karena tidak memenuhi kriteria purposive sampling penelitian ini yaitu mereka tidak memiliki NPWP sendiri, tidak didaftarkan secara kolektif di UNIKA, data yang diisikan di kuesioner tidak lengkap, mengisi kues tidak sesuai dengan petunjuk. Dengan demikian hanya terdapat 56 responden yang akhirnya menjadi sampel penelitian ini.

V.1.Deskriptif statistik

Berdasarkan jawaban responden terlihat bahwa tingkat pemahaman responden mengenai aturan perpajakan memiliki rata – rata sebesar 88.08. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak adalah sedang. Hal tersebut ternyata sebanding dengan tingkat pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu memiliki tingkat rata – rata 7.35 yang juga berada pada kisaran tinggi. Hasil statistik deskriptif responden dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Deskriptive Statistik Penelitian

Variabel	Kisaran Empiris	Kisaran Teoritis	Skala			Mean	Keterangan
			Rendah	Sedang	Tinggi		
Pemahaman Pajak	29-145	2-145	29 – 49,67	49.68 – 90.33	90.34 - 145	88.0893	Sedang
Kewajiban Pajak	4-10	2-10	2 -4.67	4.67 – 7.33	7.33 - 10	7.3571	Tinggi

V.2. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik pada Model:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005 : 110). Penelitian ini menggunakan analisis Kolmogorov – smirnov untuk menguji data normal atau tidak. Melalui analisis yang dilakukan ditemukan bahwa nilai kolmogorof smirnovnya tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat normal.

Tabel 4.5
Pengujian Normalitas Kolmogorov- Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.70875033
Most Extreme Differences	Absolute	.175
	Positive	.175
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		1.313
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini ditujukan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara variabel bebasnya (Ghozali, 2005: 91). Multikolienaritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak mengalami multikolienaritas jika tidak terdapat nilai tolerance yang lebih besar dari 10 %, dan tidak terdapat nilai VIF yang lebih kecil dari

10. Pengujian ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena dalam penelitian hanya memiliki satu variable independent.

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.714	.772		8.691	.000		
	PAHAM	.007	.008	.118	.873	.387	1.000	1.000

a. Dependent Variable: KWJB PJK

Dari hasil tersebut terlihat bahwa model regresi yang digunakan dapat dikatakan tidak mengalami multikolienaritas jika tidak terdapat nilai tolerance yang lebih besar dari 10 %, dan tidak terdapat nilai VIF yang lebih kecil dari 10.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2005: 95). Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan metode Durbin – Watson. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi ketika nilai durbin Watson berkisar antara $1.585 < dw < (4 - 1.585)$. Dengan demikian model dikatakan memenuhi asumsi ini. Pengujian ini tidak perlu dilakukan karena data yang digunakan berupa data primer persepsi seseorang pada suatu waktu tertentu bukan berupa data periode atau runtut waktu (time series) sehingga tidak ada periode yang sebelumnya (t -1).

4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 5 %, yaitu sebesar 0.468.

Tabel 4.6

Pengujian Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.722	.405		4.255	.000		
	PAHAM	-.003	.004	-.099	-.731	.468	1.000	1.000

a. Dependent Variable: ABS_RES

Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan persamaan sebagai berikut :

$$KWJB\ PJK = \beta_0 + \beta_1 PAHAM$$

Hipotesis diterima jika masing-masing koefisien regresi variable independent positif dan memiliki probabilitas value kurang dari alpha (α) sebesar 5 %.

Adapun hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier sederhana ditunjukkan dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7
Pengujian Hipotesis : Regresi Sederhana

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.118(a)	.014	-.004	1.72450

a Predictors: (Constant), PAHAM

b Dependent Variable: KWJBPK

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.714	.772		8.691	.000
	PAHAM	.007	.008	.118	.873	.387

a Dependent Variable: KWJBPK

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan hasil bahwa pengaruh pemahaman aturan pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak mempunyai koefisien positif (0.007) dan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan (.873) maka hipotesis penelitian pemahaman terhadap aturan pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak ditolak.

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini ditolak bisa disebabkan karena keterbatasan penelitian dalam hal sampel. Kondisi Wajib Pajak yang bersedia dan dapat menjadi sampel adalah wajib pajak yang mengisi SPT 1770 SS (Sangat Sederhana). Padahal tingkat kompleksitas SPT 1770 SS ini sangat rendah. SPT ini hanya melaporkan aktiva dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak, tanpa meminta wajib pajak untuk menghitung pajak terutangnya. Tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sudah dihitung oleh pihak pemberi kerja. Oleh karena penekanan kewajiban pajak dalam SPT Sangat Sederhana mengakibatkan tingkat pemahaman wajib pajak menjadi kurang mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajaknya.

Selain itu dalam statistik deskriptif terlihat bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan adalah sedang (mean sebesar 88.08). Kondisi sedang ini tercermin dari pemahaman responden yang cukup tinggi dalam hal tarif pajak yang dikenakan maupun penghasilan yang menjadi obyek pajak. Akan tetapi pemahaman mengenai aturan pajak terutama berkaitan waktu pelaporan, denda, sanksi masih rendah. Padahal tingkat pemahaman ini diukur setelah para pengisi SPT melakukan pelaporan pajak dan wajib pajak sudah mendapatkan pengarahan pengisian SPT dari institusi. Oleh karena itu akan lebih

baik jika pengarahan dan pelatihan pengisian SPT lebih diintensifkan, sehingga tingkat pemenuhan kewajiban pajak menjadi semakin tinggi.

VI. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pemahaman wajib pajak adalah sedang (mean sebesar 88.08). Kondisi sedang tercermin dari pemahaman responden yang cukup tinggi dalam hal tarif pajak yang dikenakan maupun waktu pelaporan. Akan tetapi pemahaman responden masih rendah mengenai aturan pajak terutama berkaitan penghasilan apa saja yang menjadi obyek pajak, denda, dan sanksi perpajakan. Tingkat pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan pada pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang mendaftar secara kolektif.

Kelemahan dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan responden karena rendahnya jawaban responden yang dapat diolah, dan semua responden yang menjadi wajib pajak ternyata hanya menggunakan 1 model pelaporan saja yaitu SPT 1770 SS. Sedangkan wajib pajak yang mengisi SPT 1770s dan 1770 belum terjaring sebagai responden. Variabel pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan metode self-rating, sehingga belum dapat diketahui seberapa besar sesungguhnya tingkat pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Snatoso. 1981. *Pengantar hukum Pajak*. Bandung : Eresco.
- Cooper, D.R, dan C.W., Emory. 1996. *Business Research Meyhods*, 5th edition. Richard D. Irwin, Inc.,USA.
- Ghozali, Imam. 2005 Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2005. Secara Legal : Bolehklah Tax – Avoidance ? Usahawan Th. XXXIV. Nomor 006. Juni 2005
- Harahap, Abdul Asri. 2003. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi Politik. Jakarta : Integrita Dinamika Preas.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak download tanggal 24 April 2007.
- Larry dkk. 1994. Dictionary of Tax Terms. New York : Barron's Bussiness.
- Munawir. 1992. Perpajakan. Yogyakarta : Liberty.
- PPA FE UMY. 2006. materi workshop matakuliah dan praktikum akuntansi manajemen pemerintah daerah untuk dosen akuntansi sector public.
- Ratnaningsih, St.Dyah Ayu dan Rini Hastuti. 2007. Pengaruh Kompleksitas dan Ketidakadilan Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan membayar Pajak : Studi Wajib Pajak Orang Pribadi.- Laporan Penelitian Perpajakan – Tidak Dipublikasikan.
- Ratnaningsih, St.Dyah Ayu dan St.Lily Indarto. 2008. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan akuntansi pajak pada peusahaan kecil dan perorangan,
- Sadhani, Djazoeli. Bisnis Indonesia Senin, 23 Mei 2005. Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak.
- Suandy, Erly. 2003. Perencanaan Pajak. Salemba Empat Jakarta.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan. 2000. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat Jakarta.

Wartick, Martha L. 1994. Legislative justification and the Perceived Fairness of Tax Law Changes: a Referent Cognitions Theory Approach. The Journal of the American Taxation Association vol. 16. No. 2 pp. 106-123
<http://www.irs.com>